



Dinamika Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Periode 2021-2024: Analisis Data Panel

Anggia Cahyatama Margianto^{1*}, Didit Purnomo²

Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Correspondence: E-mail: b300230118@student.ums.ac.id¹, dp274@ums.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Pulau Sumatera periode 2021–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews 12. Pemilihan model dilakukan melalui pengujian *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*, yang dilanjutkan dengan uji asumsi dan kelayakan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Peningkatan PDRB mencerminkan aktivitas ekonomi yang lebih baik, sehingga berpotensi memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. IPM juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup dapat menekan kemiskinan. Secara simultan, PDRB dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi dan manusia yang inklusif dalam upaya mengurangi kemiskinan antarwilayah.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 9 October 2026

First Revised 13 October 2026

Accepted 14 October 2026

First Available online 14 October 2026

Publication Date 14 October 2026

Keyword:

Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, PDRB, Pulau Sumatera, Regresi Data Panel.

1. PENDAHULUAN

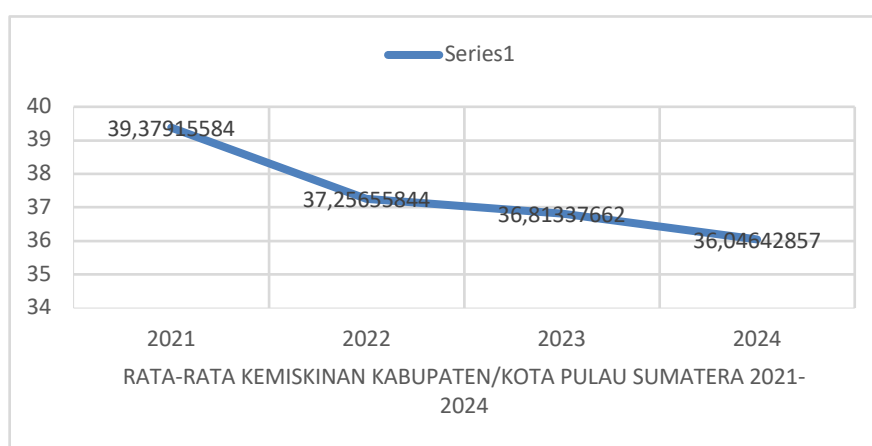
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam proses pembangunan suatu wilayah, termasuk di Pulau Sumatera. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Bagi masyarakat yang berada dalam kondisi miskin, keterbatasan tersebut menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Kesadaran terhadap kondisi kemiskinan juga dapat muncul ketika individu membandingkan keadaan kehidupannya dengan masyarakat lain yang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi lebih tinggi. Dalam jangka panjang, kemiskinan dapat memberikan dampak terhadap produktivitas, kualitas sumber daya manusia, serta tingkat pendapatan masyarakat. Selain itu, kondisi kemiskinan berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial, seperti meningkatnya angka putus sekolah, pengangguran, kriminalitas, dan permasalahan kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat pembangunan manusia, yang salah satunya tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Suliswanto, 2010 dalam Silaban et al., 2020).

Pulau Sumatera dipilih sebagai wilayah penelitian karena memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional dan merupakan kontributor ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah Pulau Jawa. Meskipun demikian, struktur perekonomian di sebagian besar kabupaten/kota di Pulau Sumatera masih banyak bertumpu pada sektor primer, khususnya perkebunan dan pertambangan. Ketergantungan terhadap sektor tersebut menyebabkan kondisi perekonomian daerah relatif rentan terhadap perubahan harga komoditas di pasar global. Keadaan ini dapat menghasilkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang relatif tinggi, tetapi belum tentu mencerminkan pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu dikaji tidak hanya dari sisi peningkatan output daerah, tetapi juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Pemilihan periode penelitian tahun 2021–2024 didasarkan pada kondisi perekonomian daerah yang berada dalam fase pemulihan setelah pandemi COVID-19. Periode tersebut merupakan masa transisi dari kondisi perlambatan ekonomi menuju pemulihan yang lebih stabil. Perubahan PDRB dan perkembangan IPM selama periode tersebut menjadi aspek penting untuk dianalisis dalam melihat kemampuan pertumbuhan ekonomi daerah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menekan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, periode 2021–2024 dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara perkembangan ekonomi, pembangunan manusia, dan kemiskinan pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi.

Secara empiris, upaya pengentasan kemiskinan di Pulau Sumatera masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2021–2024, tingkat kemiskinan antarkabupaten/kota di Pulau Sumatera masih menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Beberapa wilayah yang memiliki aktivitas industri, perkebunan, maupun pertambangan yang berkembang mampu menghasilkan PDRB relatif tinggi, tetapi kondisi tersebut tidak selalu diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa tingginya aktivitas ekonomi belum sepenuhnya menjamin pemerataan pendapatan dan distribusi manfaat pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Kemiskinan yang berlangsung dalam jangka panjang dapat membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, sehingga pada akhirnya berpotensi menurunkan produktivitas dan memperlambat peningkatan kesejahteraan. Apabila tidak ditangani secara efektif, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih kompleks, antara lain meningkatnya putus sekolah, pengangguran, kerentanan kesehatan, dan kriminalitas. Oleh sebab itu, kajian mengenai pengaruh PDRB dan IPM terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera selama periode 2021–2024 menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya memahami sejauh mana pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut. Rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Pulau Sumatera selama periode 2021–2024 disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Rata-Rata Kemiskinan Kabupaten/Kota Pulau Sumatera 2021-2024

Sumber: Olah Data Excel, 2026

Berdasarkan Gambar 1, pada periode 2021–2024 yang merupakan fase pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19, rata-rata tingkat kemiskinan antarkabupaten/kota di Pulau Sumatera masih menunjukkan disparitas yang cukup besar. Ketimpangan tersebut terlihat dari perbedaan kondisi ekonomi antarwilayah, khususnya antara daerah yang memiliki basis industri dan perkebunan berskala besar dengan wilayah yang memiliki struktur ekonomi relatif terbatas. Keberadaan sektor industri dan perkebunan dapat mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi tingginya PDRB tidak selalu diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera selama periode 2021–2024 belum sepenuhnya bersifat inklusif dan manfaat pembangunan ekonomi belum terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

World Bank melalui *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty* (2001) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketika individu atau kelompok masyarakat tidak mampu mencapai standar kehidupan ekonomi yang layak. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga tercermin dari terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sejalan dengan pandangan tersebut, United Nations Development Programme (UNDP) memandang kemiskinan sebagai persoalan multidimensional yang tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat pendapatan. Kemiskinan juga berkaitan dengan rendahnya kualitas hidup,

keterbatasan akses pendidikan, serta ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan dan sandang.

Permasalahan kemiskinan dapat dijelaskan melalui konsep *vicious circle of poverty* yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1958). Teori tersebut menjelaskan bahwa kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan akibat adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan ekonomi, dan keterbatasan modal yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya produktivitas masyarakat. Pada wilayah yang tertinggal atau belum berkembang, rendahnya produktivitas menyebabkan jumlah output yang dihasilkan menjadi terbatas sehingga pendapatan masyarakat juga berada pada tingkat yang rendah. Pendapatan tersebut sebagian besar hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar sehingga kemampuan masyarakat untuk menabung menjadi terbatas. Rendahnya tabungan selanjutnya menyebabkan ketersediaan modal untuk kegiatan investasi menjadi rendah. Kondisi tersebut menghambat peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas sehingga masyarakat kembali memperoleh pendapatan yang rendah. Dengan demikian, kemiskinan terus berlangsung dalam suatu siklus yang sulit diputus.

Konsep tersebut juga menunjukkan bahwa keterbatasan modal manusia menjadi salah satu faktor yang memperkuat lingkaran kemiskinan. Permata Kartika D. dan Parianom Raden (2025) menjelaskan bahwa konsep *vicious circle of poverty* Nurkse dapat dipahami melalui beberapa kondisi yang saling berkaitan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dapat menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang selanjutnya berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingkat upah. Pendapatan yang rendah kemudian membatasi kemampuan masyarakat dalam melakukan tabungan dan pembentukan modal. Di sisi lain, rendahnya kemampuan konsumsi dapat menyebabkan pemenuhan kebutuhan gizi yang tidak optimal, sehingga kondisi kesehatan dan produktivitas masyarakat turut menurun. Pada akhirnya, rendahnya produktivitas kembali menghasilkan pendapatan yang rendah dan mempertahankan siklus kemiskinan.

Berdasarkan teori tersebut, daerah yang berada dalam kondisi miskin cenderung menghadapi keterkaitan antara rendahnya produktivitas, pendapatan, tabungan, dan investasi. Oleh karena itu, pemutusan lingkaran kemiskinan membutuhkan intervensi pembangunan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi sekaligus kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks penelitian ini, peningkatan PDRB melalui pengembangan kegiatan ekonomi dan investasi serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi aspek penting yang dapat berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan.

IPM merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia dalam suatu wilayah. Konsep IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) melalui *Human Development Report* pada tahun 1990. Pada awal perkembangannya, IPM digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menggambarkan capaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. IPM memberikan gambaran mengenai sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap hasil pembangunan, khususnya dalam aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan (Cholili & Pudjihardjo, 2021). Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dapat membentuk sumber daya manusia yang lebih produktif sehingga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memperoleh pendapatan. Dengan demikian, peningkatan IPM pada akhirnya berpotensi mendorong penurunan tingkat kemiskinan dan menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.

Selain IPM, PDRB merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi dan perkembangan perekonomian suatu wilayah. PDRB mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Menurut Mankiw (2007) dalam Mukhtar et al. (2019), peningkatan aktivitas ekonomi yang tercermin melalui pertumbuhan PDRB dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Peningkatan PDRB dapat mencerminkan berkembangnya kegiatan produksi yang berpotensi menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas penerimaan pemerintah melalui aktivitas ekonomi dan perpajakan. Semakin berkembang perekonomian suatu wilayah, semakin besar pula peluang terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan PDRB diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Meskipun demikian, hubungan antara IPM, PDRB, dan kemiskinan tidak selalu berlangsung secara linear. Besarnya dampak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia terhadap kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti distribusi pendapatan, kebijakan pemerintah, struktur perekonomian, kondisi sosial, serta karakteristik geografis masing-masing wilayah. Tingginya PDRB, misalnya, belum tentu menghasilkan penurunan kemiskinan apabila peningkatan aktivitas ekonomi tidak diikuti oleh pemerataan kesempatan kerja dan distribusi manfaat pembangunan kepada masyarakat lokal. Demikian pula, tingginya capaian IPM tidak secara otomatis menghilangkan kemiskinan apabila masih terdapat keterbatasan dalam penyerapan tenaga kerja, akses ekonomi, dan pemerataan pendapatan.

Kondisi tersebut dapat ditemukan pada sejumlah kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang memiliki karakteristik ekonomi, geografis, dan sosial yang beragam. Beberapa wilayah dengan tingkat IPM yang relatif tinggi masih menghadapi persoalan kemiskinan yang persisten. Salah satu penyebabnya dapat berkaitan dengan terbatasnya kemampuan perekonomian daerah dalam menyerap tenaga kerja lokal secara optimal. Di sisi lain, perbedaan struktur ekonomi, tingkat aksesibilitas, kondisi geografis, serta kebijakan pembangunan antardaerah dapat menghasilkan respons yang berbeda terhadap perubahan PDRB dan IPM. Oleh sebab itu, keterkaitan antara PDRB, IPM, dan kemiskinan di Pulau Sumatera perlu dikaji dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Pendekatan data panel menjadi relevan digunakan karena mampu menggabungkan dimensi antarwilayah dan dimensi waktu secara simultan. Melalui pendekatan tersebut, pengaruh IPM dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan dapat dianalisis dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik masing-masing kabupaten/kota serta perubahan kondisi ekonomi selama periode penelitian. Penggunaan data panel juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika kemiskinan di Pulau Sumatera dibandingkan dengan analisis yang hanya mempertimbangkan dimensi wilayah atau waktu secara terpisah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera selama periode 2021–2024 dengan menggunakan pendekatan regresi data panel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai peran pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan

kemiskinan yang lebih efektif, khususnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, pemerataan manfaat pembangunan, dan penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan kajian pembangunan ekonomi serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan.

1.1. Tinjauan Pustaka

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, baik kebutuhan pokok, primer, maupun tersier, sehingga mencerminkan rendahnya standar hidup dan kesejahteraan dibandingkan dengan kondisi yang berlaku di lingkungan sekitarnya (Suparlan, 1984 dalam Fahmi Ginanjar et al., 2018). Kondisi tersebut dapat berdampak pada kesehatan, kehidupan moral, dan harga diri masyarakat miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Menurut Sumedi dan Supadi (dalam Fahmi Ginanjar et al., 2018), masyarakat miskin ditandai oleh keterbatasan dalam mengambil keputusan terkait kehidupannya, keterasingan dari lingkungan sekitar, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada pendapatan, keterjebakan dalam kondisi sumber daya manusia yang rendah seperti lemahnya etos kerja, pola pikir sempit, dan fatalisme, serta rendahnya kepemilikan aset dan akses terhadap sumber daya lingkungan.

Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Penajam & Utara (2019), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah, yang dapat menggambarkan nilai barang dan jasa neto yang dihasilkan dari aktivitas perekonomian daerah. PDRB dapat disajikan berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Menurut Prishardoyo (2008, dalam Lisa et al., 2022), perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, yang menghitung nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode tertentu; pendekatan pendapatan, yang mengukur balas jasa atau kompensasi yang diterima faktor-faktor produksi atas keterlibatannya dalam proses produksi; serta pendekatan pengeluaran, yang menghitung seluruh pengeluaran akhir, meliputi konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto selama periode tertentu.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) melalui *Human Development Report* tahun 1990 sebagai indikator untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di berbagai negara. Menurut UNDP, IPM mencerminkan capaian pembangunan dalam aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup, sedangkan Lestari Riana P. (2017) menjelaskan bahwa IPM merupakan hasil pengukuran pembangunan manusia berdasarkan komponen dasar kualitas hidup, meliputi kesehatan, pendidikan melalui partisipasi dan lama sekolah, serta standar hidup yang tercermin dari kemampuan daya beli. Sejalan dengan konsep modal manusia, Mankiw (2003) dalam Mukhtar et al. (2019) menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan

dapat meningkatkan wawasan serta keterampilan tenaga kerja, sehingga pengembangan kualitas sumber daya manusia menjadi penting dalam mendorong peningkatan IPM dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pengukurannya, Badan Pusat Statistik menggunakan indikator yang mencerminkan kualitas hidup, kesempatan dan kebebasan dalam menentukan pilihan, serta aspek kesejahteraan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan.

Hubungan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan

Menurut Romhadhoni et al (2019) dalam (Christono A.B & Putri Dzulia D, 2021), Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan mengukur nilai tambah produksi barang dan jasa menggunakan tahun dasar tertentu. Produk Domestik regional Bruto yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan, namun hal ini tidak terdistribusi dengan merata. Menurut (Nurhamidah Rahma & Surhartini Atik Mar'atis, 2014), menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan, meskipun efektivitas pengaruh tersebut bergantung pada keterlibatan pertumbuhan ekonomi. Menurut , menyatakan bahwa hasil penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan, sesuai dengan penelitian terdahulu dan juga sesuai dengan hipotesis bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Menurut Todaro (2000) dalam (Mahroji et al., 2019), pembangunan manusia merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan merupakan kunci untuk meningkatkan negara dalam mencapai teknologi modern serta membangun pertumbuhan yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia mengukur keberhasilan berdasarkan kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dari ketiga hal itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan suatu negara. Menurut Utami (2020) dalam (Setiawan et al., 2024), IPM mengukur harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup suatu negara. Indikator ini digunakan untuk mengklasifikasikan negara sebagai negara maju, berkembang, atau terbelakang, serta mengukur dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut (Ashari & Athoillah, 2023), menyatakan bahwa hasil penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan, sesuai dengan penelitian terdahulu dan juga sesuai dengan hipotesis bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder perhitungan tahunan (*yearly*) dari tahun 2021-2024 dan dianalisis menggunakan pendekatan regresi data panel. Data sekunder yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS) pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Variabel dependen penelitian adalah kemiskinan, sedangkan variabel independennya mencakup Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia. Data pada penelitian ini menggunakan regresi data panel dan diolah dengan aplikasi evIEWS 12. Rumus persamaan analisis regresi data panel pada penelitian ini sebagai berikut:

$$\log K_t = \beta_0 + \beta_1 \log PDRB_t + \beta_2 IPM_t + \varepsilon$$

Keterangan:

- K_t : Kemiskinan (Ribuan Jiwa)
- β₀ : Konstanta
- β₁...β₂ : Koefisien regresi variabel independen

t	: Tahun ke t
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia (Skala 0-100)
ε	: Error

Analisis data panel dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari menentukan estimasi, memilih metode (*Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*), melakukan uji asumsi klasik dan panel, menguji kelayakan model, dan interpretasi hasil. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang dampak faktor sosial ekonomi terhadap kemiskinan yang berguna untuk merancang kebijakan efektif untuk kesejahteraan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Pemilihan Model

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai. Hasil pengujian disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Pemilihan Model

Uji	Statistik	Probabilitas	Keputusan
Uji Chow (Cross-section F)	825,5533	0,0000	FEM
Uji Hausman (Cross-section Random)	112,0963	0,0000	FEM

Sumber: Olah Data EViews, 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1, Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < \alpha (0,01)$, sehingga Common Effect Model (CEM) ditolak dan Fixed Effect Model (FEM) dipilih sebagai model yang lebih tepat. Selanjutnya, Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < \alpha (0,01)$, yang berarti Random Effect Model (REM) ditolak dan FEM kembali menjadi model yang sesuai. Dengan demikian, berdasarkan kedua pengujian tersebut, model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Setelah Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai model yang paling sesuai, estimasi dilakukan untuk mengetahui pengaruh PDRB dan IPM terhadap kemiskinan. Hasil regresi data panel ditampilkan secara ringkas pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Probabilitas
Konstanta	5,351959	16,02261	0,0000
LOGPDRB	-0,156840	-3,311569	0,0010
IPM	-0,022858	-3,650163	0,0003
R-squared	0,997991		
Adjusted R-squared	0,997312		
F-statistic	1470,706		
Prob. F-statistic	0,0000		
Durbin-Watson	1,704871		

Sumber: Olah Data EViews, 2026

Berdasarkan hasil estimasi FEM pada Tabel 2, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang ditunjukkan oleh koefisien sebesar -0,156840 dengan probabilitas $0,0010 < 0,01$. Artinya, peningkatan PDRB cenderung diikuti oleh penurunan tingkat

kemiskinan. Sementara itu, IPM juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan koefisien sebesar -0,022858 dan probabilitas $0,0003 < 0,01$, sehingga peningkatan kualitas pembangunan manusia berkaitan dengan menurunnya kemiskinan. Secara simultan, PDRB dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Prob. F-statistic sebesar $0,0000 < 0,01$. Nilai R-squared sebesar 0,997991 menunjukkan bahwa sekitar 99,80% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel PDRB dan IPM beserta efek tetap masing-masing cross-section, sedangkan sekitar 0,20% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas untuk mengetahui hubungan antarvariabel independen dalam model penelitian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

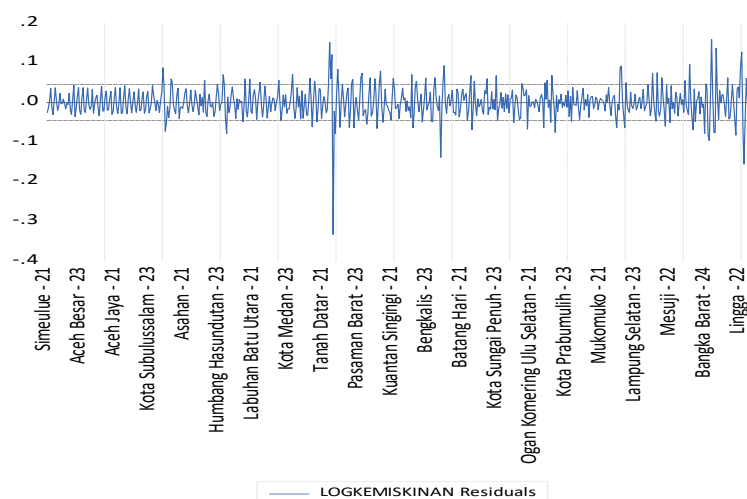
Variabel	LOGPDRB	IPM
LOGPDRB	1.000000	0.302810
IPM	0.302810	1.000000

Sumber: Olah Data EViews, 2026

Berdasarkan Tabel 3, nilai korelasi antara variabel LOGPDRB dan IPM sebesar 0,302810, yang berada di bawah batas 0,85. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model penelitian. Artinya, hubungan antarvariabel independen masih berada pada tingkat yang tidak mengganggu proses estimasi regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, seluruh residual berada dalam batas 500 dan -500. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa residual tidak menunjukkan pola penyebaran yang mengindikasikan perubahan varians secara sistematis. Dengan demikian, model regresi dapat dinyatakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas..

Hasil Uji Estimasi

Hasil estimasi regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM) untuk menganalisis pengaruh PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Pulau Sumatera disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Probabilitas	Keterangan
Konstanta	5,351959	16,02261	0,0000	Signifikan
LOGPDRB	-0,156840	-3,311569	0,0010	Signifikan
IPM	-0,022858	-3,650163	0,0003	Signifikan
R-squared	0,997991			
Adjusted R-squared	0,997312			
F-statistic	1470,706			
Prob. F-statistic	0,0000			

Sumber: Olah Data EViews, 2026

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang ditunjukkan oleh koefisien sebesar -0,156840 dengan probabilitas $0,0010 < 0,01$, sehingga peningkatan PDRB cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan; karena PDRB dinyatakan dalam bentuk logaritma, kenaikan PDRB sebesar 1% diperkirakan menurunkan kemiskinan sekitar 0,1568%, dengan asumsi variabel lain konstan. Selanjutnya, IPM juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan koefisien sebesar -0,022858 dan probabilitas $0,0003 < 0,01$, yang menunjukkan bahwa peningkatan IPM berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Secara simultan, nilai Prob. F-statistic sebesar $0,0000 < 0,01$ menunjukkan bahwa PDRB dan IPM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, nilai R-squared sebesar 0,997991 menunjukkan bahwa sekitar 99,80% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh PDRB dan IPM dalam model FEM, sedangkan sekitar 0,20% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM) pada Tabel 4, variabel PDRB memiliki koefisien sebesar -0,156840 dengan nilai probabilitas $0,0010 < 0,01$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Pulau Sumatera periode 2021–2024. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan diterima. Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan PDRB cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Karena PDRB menggunakan bentuk logaritma sedangkan kemiskinan juga dinyatakan dalam bentuk logaritma, kenaikan PDRB sebesar 1% diperkirakan menurunkan kemiskinan sebesar 0,1568%, dengan asumsi variabel lain tetap.

Secara teoritis, hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah dapat mendorong penurunan kemiskinan melalui peningkatan produksi, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat. PDRB yang meningkat mencerminkan bertambahnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah, sehingga perkembangan aktivitas ekonomi berpotensi memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Herlambang dan Rachmawati (2023) yang menemukan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan

penelitian Cholili dan Pudjihardjo (2021) yang menemukan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap kemiskinan dapat berbeda antarwilayah, bergantung pada karakteristik perekonomian, pemerataan hasil pembangunan, serta kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM) pada Tabel 4, variabel IPM memiliki koefisien sebesar -0,022858 dengan nilai probabilitas $0,0003 < 0,01$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Pulau Sumatera periode 2021–2024. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan diterima. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi IPM, semakin rendah tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan di wilayah penelitian.

Secara teoritis, peningkatan IPM melalui perbaikan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat. Pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kondisi kesehatan yang lebih baik mendukung kemampuan masyarakat untuk bekerja secara produktif, sedangkan peningkatan standar hidup mencerminkan membaiknya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan dan keluar dari kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cholili dan Pudjihardjo (2021) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Herlambang dan Rachmawati (2023) yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Dengan demikian, hasil penelitian memperkuat temuan terdahulu bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menekan tingkat kemiskinan.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi di Pulau Sumatera periode 2021–2024. Peningkatan PDRB menunjukkan membaiknya aktivitas ekonomi yang dapat mendorong terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga berpotensi menurunkan kemiskinan. Sementara itu, peningkatan IPM melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup dapat meningkatkan produktivitas serta kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih layak, sehingga turut menekan kemiskinan. Meskipun demikian, pengaruh PDRB terhadap kemiskinan tidak terlepas dari kondisi struktural dan eksternal, seperti kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, urbanisasi, fluktuasi harga komoditas, dinamika ekonomi, serta kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif melalui penguatan UMKM, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat memberikan manfaat yang lebih merata dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.

5. REFERENCES

- Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Tapal Kuda. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 2(2), 313–326. <https://doi.org/10.21776/Idess.2023.02.2.08>
- Cholili, F. M., & Pudjihardjo, M. (2021). *Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)*.
- Christono A.B, & Putri Dzulia D. (2021). Admin1,+Dzulia+Denada+Putri. *Journal Of Economics And Business Ubs*.
- Fahmi Ginanjar, R. A., Setyadi, S., Suiroh, U., Adi, R., Ginanjar, F., Ilmu, J., Pembangunan, E., & Untirta, F. (2018). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jequ*, 8(2). <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/>
- Herlambang, B., & Rachmawati, N. S. A. (2023). Pengaruh Pdrb, Ipm, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 27(1), 52–60. <https://doi.org/10.24123/Jeb.V27i1.5732>
- Human Development Report*. (1990). Oxford University Press : United Nations Development Programme (Undp).
- Lestari Riana P. (2017). *Skripsi_Lestari*.
- Lisa, K., Juanda, R., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Malikussaleh, U. (2022). Pengaruh Ekspor Dan Tenaga Kerja Informal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto 5 Provinsi Di Pulau Sumatera (Studi Kasus Sektor Pertanian). *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi Jaie*, 1(2).
- Mahroji, D., Ekonomi, J., Stie, P., & Madania, P. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. *Jequ*, 9(1). <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/>
- Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A. S. (2019). The Analysis Of The Effects Of Human Development Index And Opened Unemployment Levels To The Poverty In Indonesia. In *Jurnal Ecoplan* (Vol. 2, Number 2).
- Nurhamidah Rahma, & Surhartini Atik Mar'atis. (2014). Determinan Konvergensi Pendapatan Di Provinsi Sumatra Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 15(1). <https://doi.org/10.7454/Jepi.V15i1.1308>
- Nurkse Ragnar. (1958). *Problems Of Capital Formation Underdeveloped Countries*.
- Penajam, K., & Utara, P. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto*.
- Permata Kartika D, & Parianom Raden. (2025). 06-Jded-Andrea-Kartika. *Jurnal Of Development Economic And Digitalization*.
- Rahmawati Apia, Liliana Liliana, Sri Rahayu Wulaningsih, & Deta Septea. (2025). Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 2(4), 173–188. <https://doi.org/10.61132/Apke.V2i4.1901>
- Setiawan, P., Muchtar, M., Robinson Sihombing, P., Keuangan Negara Stan, P., & Pusat Statistik, B. (2024). Determinan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. In *Journal Of Law, Administration, And Social Science* (Vol. 4, Number 1).
- Silaban, P. S. M. J., Br Sembiring, P. S., Br Sitepu, V. A., & Br Sembiring, J. P. (2020). The Pengaruh Ipm Dan Pdrb Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara Tahun 2002-2017. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 311–321.

<https://doi.org/10.36778/Jesya.V4i1.288>

World Development Report, 2000/2001 : Attacking Poverty. (2001). Published For The World Bank, Oxford University Press.